



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DINAS PMD)**

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan SunanMuria No.20 Telp. / Fax. (0231) 321710
S U M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON
Nomor : 050/ 111/DINAS PMD/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan *Focus Group Discussion* di Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri D);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D).

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 20 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 050/ 111 /DINAS PMD/2022

TANGGAL : 20 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Status Kemajuan Kemandirian Desa	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	2 Desa	5 Desa	28 Desa	49 Desa	70 Desa	91 Desa	91 Desa
1.1	Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.81 Poin	0.81	0.84	0	0	0	0.84 Poin
1.2	Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.78 Poin	0.84	0.85	0	0	0	0.85 Poin
1.3	Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.78 Poin	0.78	0.80	0	0	0	0.80 Poin
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	3.55	3.55	3.56	3.57	3.58	3.58 poin
1.5	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0	0	0.72	0.73	0.74	0.75	0.75 Poin

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.6	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Persentase Jumlah Desa Yang Memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	0	0	20	40	55	70	70 %

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON



Drb. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

A. VISI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Agar dapat bersinergis dengan visi Kabupaten Cirebon, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan visi yakni **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN.**

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan. Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi yaitu :**MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH**

C. TUJUAN

Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa

D. SASARAN

- 1) Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa;
- 2) Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa;
- 3) Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD.
- 5) Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun;
- 6) Meningkatnya jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa.

**E. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)**

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri 49 Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Renstra
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang terisi x Nilai Penimbang 3,56 poin	Sekretariat	Hasil Kuisoner
1.2	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai Status Indeks Desa Membangun	Jumlah nilai IDM se-kabupaten Cirebon : Jumlah Desa 0.73 Poin	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelaporan Bidang, Desa
1.3	Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDes	(Jumlah Desa yang menganggarkan PADesa di APBDes : Jumlah Desa se Kabupaten Cirebon) x 100 % 40 %	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Pelaporan Bidang, Desa

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,56 Poin	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	64.608.100	Sekretariat
						<p>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p>	5.224.780.100	
						<p>1 Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6) Penyediaan Bahan/Material</p> <p>7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	246.650.700	

						1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151,919,028	
						1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.914.100	
						1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
						2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
2	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0.73	100 %	PROGRAM PENATAAN DESA	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	157.336.400	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
						1)	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		
						2)	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa		
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah	6.524.980.952	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
						1)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
						2)	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
						3)	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
						4)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
						5)	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa		
						6)	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
						7)	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
						8)	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		

					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	622.163.000	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat
						1)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
						2)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
						3)	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
						4)	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
						5)	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
3	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	40%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	287.065.550	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
						1)	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
						2)	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		

F. KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan didesa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TA. 2022

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				13.514.552.430	68.865.500		0	13.583.417.930	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.923.006.528	68.865.500			5.991.872.028	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64.608.100				64.608.100	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.544.500				18.544.500	
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.749.100				13.749.100	
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.474.700				13.474.700	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.377.800				9.377.800	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.462.000				9.462.000	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.224.780.100				5.224.780.100	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.202.918.000				5.202.918.000	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.559.600				8.559.600	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.302.500				13.302.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				177.785.200	68.865.500				246.650.700	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.194.400					9.194.400	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			68.865.500				68.865.500	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.030.000					30.030.000	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.039.800					44.039.800	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.500.000					22.500.000	
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.891.000					41.891.000	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.130.000					30.130.000	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				151.919.028					151.919.028	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115.199.028					115.199.028	
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36.720.000					36.720.000	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				303.914.100					303.914.100	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97.260.000					97.260.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.085.000				10.085.000	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195.769.100				195.769.100	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA				157.336.400				157.336.400	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa				157.336.400				157.336.400	
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		33.750.000				33.750.000	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123.586.400				123.586.400	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				287.065.550				287.065.550	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa				287.065.550				287.065.550	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120.014.400				120.014.400	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DTU-DAU, Bankeu Prov	Kab. Cirebon		167.051.150				167.051.150	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				6.524.980.952				6.524.980.952	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				6.524.980.952				6.524.980.952	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		243.671.600				243.671.600	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		34.995.100				34.995.100	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		76.026.900				76.026.900	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		5.941.585.952				5.941.585.952	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		73.189.800				73.189.800	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		25.598.900				25.598.900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		57.668.700				57.668.700	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon,		72.244.000				72.244.000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				622.163.000				622.163.000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				622.163.000				622.163.000	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon		171.048.700				171.048.700	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000				50.000.000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.763.900				32.763.900	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000				50.000.000	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		318.350.400				318.350.400	

BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja utama tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET IKU 2021	REALISASI IKU 2021	%	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Target Desa Mandiri Tahun 2021 =28 desa. Relisasi desa Mandiri Tahun 2021 = 42 desa. Jadi $42/28 \times 100$ % = 150 %	Desa	28	42	150%	Semua Program
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,84	Poin	0,84	0,879	104,76%	Penataan Desa, Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,85	Poin	0,85	0,810	95.29%	Administrasi Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,80	Poin	0,80	0,844	105 %	Administrasi Pemerintah Desa
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3.55	Poin	3.55	3.55	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
5	Meningkatnya Status rata-rata indeks desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.72	Poin	0.72	0.72	100%	Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
6	Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	20	%	20%	23.3%	116.5%	Kerjasama Desa

b) Perbandingan antara realisasi kinerja utama serta capaian kinerja utama tahun 2021 dengan tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Perhitungan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	IDM =1/3 (IKS+IKE+IKL)	5 Desa	7 Desa	28 Desa	42 Desa
2	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	DESA MANDIRI (IDM > 0,8155) DESA MAJU (0,8155 ≥ IDM > 0,7072) DESA BERKEMBANG (0,7072 ≥ IDM > 0,5989) DESA TERTINGGAL (0,5989 ≥ IDM > 0,4907) DESA SANGAT TERTINGGAL (IDM ≤ 0,4907)	0,81 Poin	0.89 Poin	0,84 Poin	0.879 Poin
3	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	DESA MANDIRI (IDM > 0,8155) DESA MAJU (0,8155 ≥ IDM > 0,7072) DESA BERKEMBANG (0,7072 ≥ IDM > 0,5989) DESA TERTINGGAL (0,5989 ≥ IDM > 0,4907) DESA SANGAT TERTINGGAL (IDM ≤ 0,4907)	0,84 Poin	0.84 Poin	0,85 Poin	0.81 Poin
4	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	DESA MANDIRI (IDM > 0,8155) DESA MAJU (0,8155 ≥ IDM > 0,7072) DESA BERKEMBANG (0,7072 ≥ IDM > 0,5989) DESA TERTINGGAL (0,5989 ≥ IDM > 0,4907) DESA SANGAT TERTINGGAL (IDM ≤ 0,4907)	0,78 Poin	0.72 Poin	0,80 Poin	0.84 Poin
5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Bobot nilai rata-rata tertimbang=Jumlah Bobot/Jumlah Unsur	-	-	3.55 Poin	3.55 Poin
5	Meningkatnya Status rata-rata indeks desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	-	0.72 Poin	0.72 Poin
6	Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	-	-	20 %	23.3 %

c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah Dalam RENSTRA	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sampai dengan Tahun 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		Meningkatnya jumlah desa Mandiri	28 Desa	42 Desa
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81 Poin	0.89 Poin
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,84 Poin	0.84 Poin
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0.72 Poin
4	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.55 Poin	3.55 Poin
5	Meningkatnya Status rata-rata indeks desa membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.72 Poin	0.72 Poin
6	Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	20 %	23.3 %

d) Perbandingan realisasi kinerja utama tahun 2020 dengan standar nasional

Nihil.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Dengan memperhatikan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan berdasarkan pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah, maka dapat dirumuskan Identifikasi Permasalahan Kinerja berdasarkan Tugas, dan fungsi Dinas sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi internal	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Belum intensifnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa yang berkaitan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi internal	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Belum intensifnya koordinasi antara aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi internal	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan	Indikator sasaran Renstra/ RPJMD/IKU	Koordinasi dan komunikasi intern	Lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan	Kualitas dan kuantitas aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan public belum optimal

f) Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang

merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Cirebon diantaranya, yaitu:

Kekuatan / *Strengths* (S)

- 1) Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai;
- 3) Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Komitmen aparatur Dinas PMD dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal.

Kelemahan / *Weakness* (W)

- 1) Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan;
- 2) Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit sistem;
- 3) Koordinasi intensif lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal;
- 4) Dukungan prasarana dan sarana yang belum memadai.

g) Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan/ancaman (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang dan sekaligus mengingatkan Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan timbulnya tantangan/ancaman. Adapun Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas PMD Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu:

Peluang / *Opportunity* (O)

- 1) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa dan peningkatan

perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Bumdesa dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat;

- 2) Perkembangan Pembangunan di desa/kelurahan semakin meningkat;
- 3) Terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/kelurahan dalam meningkatkan pendapatan
- 4) Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa;
- 5) Tersedianya dukungan peraturanperundang-undangan di bidang pengembangan desa/kelurahan dan pemberdayaan kawasan perdesaan dan adanya potensi desa/kelurahan;
- 6) Adanya pembinaan dan pelatihan teknis administrasi kepegawaian dan perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Ancaman/ Threats (T)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa belum mencakup penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa;
- 2) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekedar papan nama;
- 3) Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan

perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa ;

- 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM).

FAKTOR INTERNAL	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
	Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas	Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan
	Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai	Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit sistem
	Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinasi intensif lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal
FAKTOR EKSTERNAL	Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal	Dukungan prasarana dan sarana yang belum memadai
OPPORTUNITY (PELUANG)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes)	Perlu adanya kesesuaian kompetensi pejabat terkait agar mampu mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola/pengurus Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat lainnya	Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya	Dibutuhkan kapasitas pejabat yang kompeten serta koordinasi intensif dengan tenaga ahli serta pendamping desa dalam memberdayakan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga
Adanya kegiatan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa	Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Perlu mengsinergikan kegiatan-kegiatan lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa
Adanya pembinaan dan pelatihan teknis administrasi kepegawaian dan perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dibutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
THREAT (ANCAMAN)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
Penyusunan rancangan aksi terkait pembangunan desa	Membutuhkan koordinasi antara pemangku tugas ditiap bidang untuk mengawal dan membina penyusunan	Perlu adanya kesesuaian kompetensi pejabat terkait agar mampu membina penyusunan

<p>belum mencakup penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan yang bertumpu pada pendayagunaan aset dan sumberdaya lokal. Dalam konstruksi pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk mendorong perumuskan kepentingan kolektif di desa yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa</p>	<p>rancangan aksi terkait pembangunan desa sebagai upaya penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan.</p>	<p>rancangan aksi terkait pembangunan desa sebagai upaya penguatan perencanaan partisipatif dari lembaga kemasyarakatan dengan tujuan mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pendayagunaan sumberdaya lokal desa</p>
<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Ada banyak hal yang perlu dilakukan agar BUMDES yang telah berdiri tersebut bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekadar papan nama</p>	<p>Diperlukan upaya konkrit dari pemangku tugas terkait untuk meningkatkan peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar mampu menggerakkan ekonomi desa dan terlaksananya peningkatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Dibutuhkan peran aktif pejabat yang memiliki kompetensi terkait serta koordinasi intensif dengan tenaga ahli Bumdes serta pendamping desa dalam memberdayakan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga</p>
<p>Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa</p>	<p>Membutuhkan pengawalan dan pembinaan intensif dari pemangku tugas di DPMD dalam hal peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa terkait dengan perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa</p>	<p>Diperlukan sinergitas lintas sektoral terkait kegiatan-kegiatan yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan desa</p>
<p>Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Perlu adanya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>	<p>Dibutuhkan kelengkapan prasarana dan sarana yang memadai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>

B. Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN(Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	14.320.157.282	13.129.630.755	91.69	1.190.526.527	8.31
	BELANJA OPERASI	14.272.718.382	13.082.191.855	91.66	1.190.526.527	8.34
	BELANJA MODAL	47.438.900	47.438.900	100	-	-
	BELANJA NON URUSAN	5.545.790.728	5.045.545.489	90.98	500.245.239	9.02
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.545.790.728	5.045.545.489	90.98	500.245.239	9.02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.217.500	46.995.400	83.60	9.222.100	16.40
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.300	29.427.200	98.09	572.100	98.09
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.137.800	9.137.800	100	-	-
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.080.400	8.430.400	49.36	8.650.00	49.36
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.732.063.500	4.309.297.696	91.07	422.765.814	8.93
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.714.975.000	4.292.209.186	91.03	422.765.814	8.97
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.559.600	8.559.600	100	-	-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.528.900	8.528.900	100	-	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.391.000	30.391.000	100	-	-
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.391.000	30.391.000	100	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.032.000	234.548.031	94.18	14.484.169	5.82
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.194.400	9.194.400	100	-	-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.438.900	47.438.900	100	-	-
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.380.000	28.380.000	100.00	-	-
4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.024.600	43.374.485	96.34	1.650.115	4.66
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.510.000	20.510.000	95.35	1.000.000	4.65
4.6	Penyediaan Bahan/Material	58.001.800	57.998.700	99.99	3.100	0.01

4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.482.500	27.651.546	70.03	11.380.954	29.97
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.919.028	111.100.463	73.13	40.818.565	26.87
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.199.028	74.380.463	64.57	40.818.565	35.43
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.720.000	36.720.000	100.00	-	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	326.167.000	313.212.409	96.13	12.954.591	3.97
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.325.000	96.412.300	91.54	8.912.700	8.46
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.150.000	5.478.600	59.88	3.671.400	40.12
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.692.000	211.321.509	99.82	370.491	0.18
BELANJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8.774.366.554	8.084.085.266	92.13	690.281.288	7.87
A	Program Penataan Desa	217.681.900	149.243.900	68.56	68.438.100	31.44
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	217.681.900	149.243.900	68.56	68.438.100	31.44
1.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	58.592.600	26.201.900	44.72	32.390.700	55.28
1.2	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	159.089.300	123.042.000	77.34	36.046.900	22.66
B	Program Peningkatan Kerjasama Desa	302.231.300	275.647.800	91.20	26.583.500	8.80
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	302.231.300	275.647.800	91.20	26.583.500	8.80
2.1	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7.718.400	1.752.900	22.71	5.965.500	77.29
2.2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	294.512.900	273.894.900	93.00	20.618.000	7.00
C	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.308.753.824	6.728.498.136	92.06	580.255.688	7.94
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	7.308.753.824	6.728.498.136	92.06	580.255.688	7.94

	Pemerintahan Desa					
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	468.843.800	460.986.500	98.32	7.857.300	1.68
3.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.119.500	16.119.500	100	-	-
3.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	6.101.607.264	5.538.695.736	90.77	562.911.888	9.23
3.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	62.501.500	62.501.500	100	-	-
3.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	148.913.200	139.813.200	93.89	9.100.000	6.11
3.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	393.404.800	393.054.800	99.91	350.000	0.09
3.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	114.663.400	114.626.900	99.97	36.500	0.03
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	945.699.530	930.695.030	92.06	15.004.500	7.94
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	945.699.530	930.695.030	92.06	15.004.500	7.94
4.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	527.639.180	518.635.680	98.29	9.003.500	1.71
4.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	140.275.000	140.275.000	100	-	-
4.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.407.000	1.407.000	100	-	-

BAB III. PERENCANAAN KINERJA UTAMA TAHUN 2022

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,56 Poin	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<p>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>3) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD</p> <p>4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	64.608.100	Sekretariat
						<p>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p>	5.224.780.100	
						<p>1 Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p>	246.650.700	

						5) 6) 7)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
						1) 1) 2)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151,919,028	
						1) 1) 2)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.914.100	
2	Meningkatnya Status rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai Status Indeks Desa Membangun	0.73	100 %	PROGRAM PENATAAN DESA	1) 1) 2)	Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	157.336.400	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	6.524.980.952	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 1) 2) 3)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	622.163.000	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat

						4) 5)	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
3	Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa	40%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1) 1) 2)	Fasilitasi Kerjasama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	287.065.550	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NP. 19690716 199006 1 001

LAMPIRAN PERBUATAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan kualitas kemampuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa standar	Jumlah Desa berstatus Desa Mandiri	Non Kumulatif	Meningkat	Rasi/9	49 Desa
1.1.A.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total nilai Persepsi Per User / Total User yang terisi x nilai Perantara	Non Kumulatif	Meningkat	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,26 Poin
1.1.S.	Meningkatnya Status Desa Desa Mandiri	Nilai Status Indeks Desa Membangun	Jumlah nilai IDI Desa se-Kabupaten Cirebon	Non Kumulatif	Meningkat	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan atau dukcapdesdesa.go.id	0,73 poin
1.1.B.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Memiliki Pendapatan Asli Desa	meningkatnya persentase Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang disanggani di AP/Desa	(Jumlah Desa yang Mengembangkan Pendapatan Asli Desa di AP/Desa - Jumlah Desa se-Kabupaten Cirebon) x 100 %	Non Kumulatif	Meningkat	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	40 Prosen

No	Program	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.1.A.01	PROGRAM PENLUNGAN JURUSAN PEMERINTAHAN DEWASA KABUPATENKOTA	3.392.872.028,99	Sumber Dana: DTU-DALU-DALU, PAD-DTU-DALU, PA Pen Jls	
1.1.S.01	PROGRAM PENYATAAN DESA	157.336.800,00	Sumber Dana: DTU-DALU	
1.1.S.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.524.860.952,00	Sumber Dana: DTU-DALU-DALU, PBHP Kabin-Tankas	
1.1.S.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	622.163.000,00	Sumber Dana: DTU-DALU	
1.1.S.03.	PROGRAM PENNOHATAN BERTASARAS DESA	287.065.550,00	Sumber Dana: DTU-DALU	
J U M L A H		13.583.437.920,99		

Pihak Kedua
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Januari 2022
Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Kepala Dinas Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperbukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650716 195006 1 001

H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.
Pembina
NIP. 19750903 200604 1 014

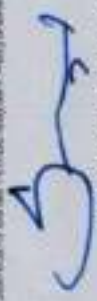
LAMPYAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



No	Tajuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Simpak / Sempak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.	Meningkatkan kualitas kehidupan dan kemakmuran desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri Desa Mandiri	Non Kumulatif	Meningkat	100 %	68 Desa
3.1.A.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan (DPA)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tarif Nilai Peringkat Per-Uraian / Total Uraian yang Merupakan Nilai Rata-rata	Non Kumulatif	Meningkat	100 %	5,34 Poin


No	Program	Indikator Kinerja (Simpak / Sempak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
1.1.A.01.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU (PAMTAS)	Meningkatnya proses pelayanan/pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan	Jumlah pemantauan pelayanan administrasi pemerintahan	Non Kumulatif	Meningkat	100 %	419.474.718,00	Sumber Dana: DPA, DMD, PPA, PPS	
		Meningkatnya proses pelayanan/pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan	Jumlah pemantauan layanan dan prosedur standar	Non Kumulatif	Meningkat	75 %	293.019.100,00	Sumber Dana: DPA, DMD, PPA, PPS	
		Meningkatnya proses pelayanan/pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan	Jumlah studi lapangan atau melaksanakan kegiatan atau	Non Kumulatif	Meningkat	100 %	3.202.018.000,00	Sumber Dana: DPA, DMD, PPA, PPS	
		Meningkatnya proses pelayanan/pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan	Jumlah total laporan kinerja dan anggaran yang terdistribusi	Kumulatif	Meningkat	100 %	40.271.900,00	Sumber Dana: DPA, DMD, PPA, PPS	
		Meningkatnya proses pelayanan/pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan	Jumlah akurasi data pengembangan informasi atau cakupan layanan	Non Kumulatif	Meningkat	100 %	45.198.100,00	Sumber Dana: DPA, DMD, PPA, PPS	
J U M L A H								3.981.072.628,00	

Sumber, Januari 2012
P3 ak Kesel2
Sakawati Eranu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



M. DEDI SUGARKAM, SH., MH.
Perburu
NIP. 13150963 200804 1 014

Picak Kesel2
Kepala Timus Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Drs. ERIUS KUSMANA, M.Si.
Perburu Ujung Mulib
NIK 19630715 199008 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SADUKI, MM.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NP. 19690716 199008 1 001

Drs. SADUKI, MM.
Pembina
NP. 19650418 198803 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIBEBON



No	Tajuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan		Sumber Data	Target Kinerja	
			Buruk (H)	Target (R)			
E1	Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa	(E1)	(R)	(R)	(R)	(R)	
E.1.1	Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya jumlah desa swadaya	Jumlah Desa Swadaya Desa Mandiri	Non Kumulatif	Kantor	40 Desa	
E.1.5	Meningkatnya jumlah desa swadaya	(E1) Status Index Desa swadaya	Jumlah desa di Desa swadaya Mandiri	Non Kumulatif	Salah Administrasi Pemerintahan Desa dan lain sebagainya	6.23 Desa	
E.1.6	Meningkatnya jumlah desa swadaya	Meningkatnya pendapatan desa yang swadaya	Jumlah Desa yang Mengembangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di jumlah desa swadaya Mandiri	Non Kumulatif	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	40 Desa	
No	Program	Indikator Kinerja (Output / Hasil)	Perhitungan		Anggaran (Rp.)	Keterangan	
E.1.5.1	PROSEDUR PERKULIAHAN DESA	Peningkatan 200 Peningkatan Jumlah Desa yang di swadaya swadaya	(R)	(R)	(R)	(R)	
E.1.5.1.1	PROGRAM PENGULIAHAN KEBERUSAHAAN DESA	Peningkatan 500 Peningkatan Jumlah Desa yang melaksanakan swadaya swadaya	Jumlah Desa yang melaksanakan swadaya swadaya	Non Kumulatif	187.285.350,00	Sumber Dana (DPA-DAU)	
J U M L A H						661.481.810,00	

Pihak Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Drs. ERUS BUSMANA, M.Si.
Pemerintah Kabupaten Cibebon
Jl. Veteran No. 100, Cibebon, Kab. Cibebon

Sumber: Januari 2022
Pihak Kota
Kepala Bidang Perencanaan dan Kearsifan Desa

Drs. SADUKI, MM.
Pemerintah Kabupaten Cibebon
Jl. Veteran No. 100, Cibebon, Kab. Cibebon



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.
Penata Tk.1
NIP. 19830429 200112 1 003

LAMPIRAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CREBON



No	Tugas / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Target / Dampak)	Perhitungan		Sumber Data	Target Kinerja	Keterangan
			Rumus	Tipe			
1.1	Mengembangkan kinerja organisasi dan penyelenggaraan desa	(2)	Jumlah Desa Tertentu Desa Mandiri	(3)	(7)	100	
1.1.1	Meningkatnya Status Desa dari Desa Berkembang	(3)	Jumlah Desa yang Berkembang menjadi Desa Mandiri	(3)	(7)	100	

No	Program	Indikator Kinerja (Definisi / Hasil)	Perhitungan		Sumber Data	Target Kinerja	Keterangan
			Rumus	Tipe			
1.1.1.1	KELOMPOK ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN DESA	(3)	Jumlah Desa yang memiliki kelompok administrasi desa	(3)	(7)	100	

Kepala Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa

[Signature]

BIG ERUS KUSUMANA, M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19800718 199008 1 001

Ketua Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

[Signature]

ADITYA ANIF MAULANA, S.STP.
Pemula TAJ
NIP. 19830429 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUKHYATI, MM,
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha
Ekonomi Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. ERUS RUSMANA, M.Si,
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199006 1 001

Dra. Hj. RUKHYATI, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19641215 199501 2 001



LAMPIRAN PERENCANAAN KEBERUK TAHUN 2022
DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

No	Tubuh / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output / Rampai)	Perhitungan		Sumber Dana	Target Kinerja
			Rumus	Target		
1.1						
1.1.1	Meningkatkan akses komunikasi dan informasi di desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa berstatus Desa Mandiri	Kumulatif	Desa Mandiri	48 Desa
1.1.2	Meningkatnya akses roads desa di desa	80% Status akses Desa Mandiri	Jumlah desa yang akses jalan Desa Mandiri	Kumulatif	Desa Mandiri	273 Desa
1.1.3	Meningkatnya akses kesehatan di desa	80% Status akses Desa Mandiri	Jumlah desa yang akses kesehatan Desa Mandiri	Kumulatif	Desa Mandiri	273 Desa
Jumlah						
No	Program	Indikator Kinerja (Output / Hasil)	Perhitungan	Type	Target	Keterangan
1.1						
1.1.1	PELOPORAN PEMBUDAYAAN LEMBAGA KESEKUTUKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT MASYARAKAT	Pembinaan Pembinaan jumlah desa yang akses kesehatan di desa	Jumlah Desa yang akses kesehatan di desa	Kumulatif	Desa Mandiri	273 Desa
Jumlah						
					10 M L R M	832.163.000,00

Ptadi Ketua
Kepala Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa

[Signature]
Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Provinsi Cirebon No. 4
HP: 0899716 22006 1 001

Sumber: Januari 2022
Provinsi Cirebon
Kepala Bidang Pembudayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Usaha Sosial Masyarakat

[Signature]
Drs. HIL BUKHYATI, MM
Provinsi Cirebon No. 2
HP: 08441213 19901 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMALUDIN MALIK, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DEDI SUDARMAN, SH,MM.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehalusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

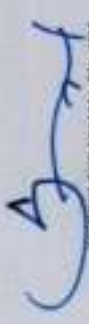
H. DEDI SUDARMAN, SH,MM.
Pembina
NIP. 19750903 200604 1 014

JAMALUDIN MALIK, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19730621 199902 1 001

Sumber, Januari 2022
Pusat Occasio
Kepala Subbagian Program dan Keuangan serta
Sekretariat

JAMALUDIN MALIK, S.H., M.Si.
Pemeriksa
NP. 1872021.109023.1.001

Pusat Kerja
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


H. UCHE SUGARMAWI, S.H., MMS.
Pemeriksa
NP. 1875003.206004.1.014

Lampiran Nomor : 227.2/11-2022/01/PA
Gubernur Kalimantan Utara

Hal. 2/2



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ANY ALPIANY
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

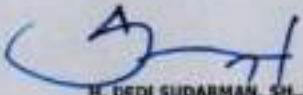
Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

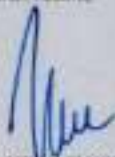
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kesatu,


H. DEDI SUDARMAN, SH.,MM.
Pembina
NP. 19750903 200604 1 014

Pihak Kesatu,


Dra. ANYALPIANY
Penata Tk.I
NP. 19681120 199303 2 003

LAMPIRAN PERJANGKAIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIRESON



No	Tajasan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Output)	Perkembangan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumusan	Tipe	Tertarget		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan akses, kualitas dan kemandirian desa	Keunggulan jumlah desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri Desa Mandiri	Non Kumulatif	Harapan		
1.1.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perencanaan di (DPO)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total Nilai Peringkat Per-Tahun / Total Nilai yang Didapat 90% - 100%	Non Kumulatif	Harapan	Peringkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,12 Pins
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output / Colokasi	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.1.1.1.	PROGRAM PENJANGKALAN PEMERINTAHAN DASAR KEMERDEKAAN			702.413.878,00			
1.1.1.1.1.1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan dan kegiatan pelayanan	3 jenis	348.450.700,00	Sumber Dana		
1.1.1.1.1.1.1.	Penyediaan Kebutuhan Logistik Pemerintahan Kabupaten	Jumlah jenis kendaraan little yang disediakan	2 jenis	8.715.400,00	Sumber Dana (DTU-DMU)		
1.1.1.1.1.1.2.	Perbaikan Pelayanan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang terlewat	3 jenis	68.883.300,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.1.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Nelayan dan Murnan yang di siapkan	1212 Smp	26.020.000,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.1.4.	Perbaikan Ruang Kantor dan Pengadaan	Jumlah barang cadangan dan perlengkapan yang disediakan	19 jenis	44.039.800,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.1.5.	Perbaikan Bahan Bakar dan Perawatan kendaraan	Jumlah Pengadaan Bahan Bakar yang terlewat	2488 liter/gal	22.530.000,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.1.6.	Perbaikan Bahan Mopel	Jumlah jenis alat tulis kantor yang di beli	41 jenis	61.841.000,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.1.7.	Perbaikan Kebutuhan Ruang Kantor dan Koneksi SIPD	Jumlah pembelian laptop komputer dan terminal ke bar internet	25 laptop/s	36.130.000,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.1.8.	Penyediaan Jasa Penjangkalan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa jasa Penjangkalan Urusan Pemerintahan Daerah yang terlewat dilaksanakan dalam 1 tahun	8 jenis	151.919.400,00	Sumber Dana		
1.1.1.1.1.2.	Perbaikan Jasa Kemukiman, Sumber Daya dan LKMD	Jumlah kegiatan yang terlewat 1 titik, 100% dan 10000	3 kegiatan	115.289.228,00	Sumber Dana: DTU-DMU, PM Ber/BK		
1.1.1.1.1.2.1.	Perbaikan Jasa Pelayanan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah jenis kendaraan dan perlengkapan kantor yang di siapkan	3 jenis	36.733.000,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.2.2.	Perbaikan Ruang HSE Daerah Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perumahan Ruang HSE Daerah yang terlewat	1 Tahun	343.914.390,00	Sumber Dana		
1.1.1.1.1.2.3.	Perbaikan Jasa Perumahan, Ruang Pemerintahan dan Ruang Kantor	Jumlah pengadaan Dana Ruda 8 (empat) dan Ruda 2 (dua) yang dipekerjakan oleh HSE (RUMAH)	11 Unit	91.260.000,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.2.4.	Perbaikan Jasa Perumahan, Ruang Pemerintahan, Ruang Kantor dan Perumahan Desa Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah pengadaan RUMAH RUMAH dan pengadaan RUMAH RUMAH yang dipekerjakan oleh HSE (RUMAH)	11 Unit	24.882.000,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
1.1.1.1.1.2.5.	Perbaikan (Kegiatan) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terlewat	2 unit	300.100.100,00	Sumber Dana: DTU-DMU		
			J U M L A H	362.883.438,00			

Lampiran Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon, 2022

Sumber, Januari 2022
Pihak Kesatu
Kepala Sekolah Umum dan Organisasi 1949
Sekeloa


Dedi SUPRIYANTO
Peraih TLI
NP. 19601320 199703 2 003

Pihak Kedua
Sekeloa Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa


H. DEDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Perencana
NP. 19750803 200604 1 614

Sekeloa Perjanjian - 1977 01 - 200000 (1/2)
Sekeloa - 1977 01 - 200000 (1/2)

Hal. 2/3



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIES YULIASMURNI, S.Sos, M.Si,
Jabatan : Kepala Seksi Kerja Sama Desa pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. SADUKI, MM.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. SADUKI, MM.
Pembina
NIP. 19650418 198803 1 010

LIES YULIASMURNI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19750615 200701 2 013

LAMPIRAN PERJALAN KEMERIA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CEBERON



No	Tubuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output / Outcome)	Perhitungan		Sumber Dana	Target Kinerja
			Kuantitas	Tipe		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.	Meningkatkan akses layanan dan kemudahan akses	Meningkatkan jumlah desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri Desa Mandiri	Desa Mandiri	Kemda	Desa
1.1.1.	Meningkatkan Jumlah Desa yang Memiliki Kapasitas dan Daya yang Berpengaruh di Desa	mencapainya persentase jumlah Desa yang memiliki Kapasitas dan Daya yang Berpengaruh di Desa yang ditargetkan di APBD2022	Jumlah Desa yang Mempertajam Kemampuan di Desa di APBD2022 Jumlah Desa Di Kabupaten Cebongan = 116 %	Desa Mandiri	Alokasi Pendapatan dan Transfer Dana	Desa

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Outcome)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.4.01.	PROGRAM PENGUKUTAN KERJAJAWA DESA			287.965.595,00	
1.1.4.01.1.	Pelatihan Kerja sama antar Desa		17 Desa	287.965.595,00	Sumber Dana 2022-2023
1.1.4.01.1.01.01.	Facilitator Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang diberikan pelatihan kerja sama antar Desa yang di fasilitasi kerjasama antar desa	17 Desa	929.814.200,00	Sumber Dana 2022-2023
1.1.4.01.1.01.02.	Facilitator Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang diberikan pelatihan kerja sama antar desa	3 Desa	5,00	Sumber Dana 2022-2023
		Jumlah Jasa Fasilitas Pelaksanaan TMSP (Survei, Rencanakan, Melaksanakan, dan Mengevaluasi) Kerja Sama Antar Desa (Kerjasama Antar Desa) Kabupaten Cebongan	7 Desa	383.478.500,00	Sumber Dana 2022-2023
		Jumlah Jasa Fasilitas Pelaksanaan TMSP (Survei, Rencanakan, Melaksanakan, dan Mengevaluasi) Kerja Sama Antar Desa (Kerjasama Antar Desa) Kabupaten Cebongan	7 Desa	64.577.800,00	Sumber Dana 2022-2023
		J U M L A H		287.965.595,00	

Pihak Kerja
Kepala Bidang Nelayan dan Kerjasama Desa

Drs. SADOSKI, HM.
Pembina
NIP. 19650418 198603 1 013
Lampiran Perjanjian 3.07.01. Subdit 7.4
e:\jurnal\1114\main\ppl\22

Serdar, Januari 2022
Pihak Instansi
Kepala Seksi Kerja Sama Desa dan Bidang Nelayan
dan Kerjasama Desa

MRS. YULIASRIWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 13720825 2007012 013
Hal. 1/1



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO WIBIKSONO, SH, M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Penataan Desa pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. SADUKI, MM.
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. SADUKI, MM.
Pembina
NP. 19650418 158803 1 010

RIO WIBIKSONO, SH, M.Si.
Penata-TKJ
NP. 19821212 200902 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 DESA PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN CIRIENDI



No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Type	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Meningkatkan etika pelayanan dan kemasyarakatan desa	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa bertingkat Desa Mandiri	Non Kumulatif	Meningkat	Persepsi	41 Desa
1.1.1	Meningkatnya jumlah desa terwujud Desa Mandiri	41% (Terdapat 17 Desa Mandiri)	Jumlah Desa yang telah terakreditasi Mandiri Desa di Kabupaten Ciriendi	Non Kumulatif	Meningkat	Salah administrasi Administrasi Desa dan Desa Mandiri Desa	41 Desa

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Kabupaten)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L.L.B.01.	PROGRAM PEMAYAKAN DESA			137.334.480,00	
L.L.B.01.01.	Perencanaan Perumahan Desa	Jumlah Desa yang diwujudkan pemukiman pemukiman pemukiman	40 Desa	137.334.480,00	Sumber Dana
L.L.B.01.01.01.	Realisasi Perumahan Kependudukan Desa	Jumlah Desa yang diwujudkan pemukiman pemukiman pemukiman	40 Desa	22.703.920,00	Sumber Dana: DTU-SDM
L.L.B.01.01.02.	Realisasi Perumahan Perumahan Desa	Jumlah Desa yang diwujudkan pemukiman pemukiman pemukiman	0 Desa	11.830.560,00	Sumber Dana: DTU-SDM
		Jumlah desa yang diwujudkan pemukiman pemukiman pemukiman	40 Desa	11.736.490,00	Sumber Dana: DTU-SDM
			1 8 1 1 1 1	137.334.480,00	

Pihak Kepala
 Kepala Bidang Perumahan dan Kependudukan Desa

Drs. SAIFUL H.M.
 Sembada
 NIP. 19630418 198803 1 016

Sumber, Januari 2022
 Pihak Kepala
 Kepala Sesi Perencanaan Desa pada Ruang Perencanaan dan
 Kependudukan Desa.

RAO KIRIYONO, SH., M.Si
 Kepala Desa
 NIP. 19821111 200902 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DANI IRAWADI, S.IP, M.Si,**
Jabatan : **Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **ADITYA ARIF MAULANA, S.STP,**
Jabatan : **Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa**

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

ADITYA ARIF MAULANA, S.STP,
Penata Tk.I
NIP. 19830429 200112 1 003

Pihak Kesatu,

DANI IRAWADI, S.IP, M.Si,
Pembina
NIP. 19771010 200501 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIBERON



No	Tubuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Output)	Pembangunan		Sumber Dana	Target Kinerja
			Kamus	Target		
151	(2)	(1)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan akses layanan bagi masyarakat desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri Desa Mandiri	Kota Samarati	Beranda	40 Desa
1.1.3.	Meningkatnya Status desa Desa Desa Mandiri	Jumlah desa Desa di Kabupaten Cibeas * jumlah Desa yang ada	Jumlah desa yang ada Kabupaten Cibeas * jumlah Desa yang ada Kabupaten Cibeas	Kota Samarati	Beranda	0-75 Desa
No	Progres / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Kegiatan)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kategori	
133	(3)	(4)	(6)	(5)	(7)	
1.1.3.3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			374.336.388,00		
1.1.3.3.2.01.	Peningkatan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa / Pemerintahan Desa dan jumlah pegawai Aparatur Pemerintahan Desa yang ada Kabupaten Cibeas	1796 orang	374.336.388,00	Sumber Dana	
1.1.3.3.2.01.01.	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang ada Kabupaten Cibeas	4 Desa	243.671.600,00	Sumber Dana (574-282)	
		Jumlah Desa yang ada Kabupaten Cibeas	417 Desa	0,00	Sumber Dana (574-282)	
		Jumlah Desa yang ada Kabupaten Cibeas	0 Desa	0,00	Sumber Dana (574-282)	
		Jumlah Desa yang ada Kabupaten Cibeas	0 Desa	0,00	Sumber Dana (574-282)	
1.1.3.3.2.01.02.	Peningkatan dan Penguatan SDM Desa dan Lembaga Desa	Jumlah Desa yang ada Kabupaten Cibeas dan jumlah pegawai Desa	40 Desa	11.664.788,00	Sumber Dana (574-282)	
1.1.3.3.2.01.03.	Peningkatan Penyelenggaraan Profesi Desa	Jumlah Desa yang ada Kabupaten Cibeas	40 Desa	11.664.788,00	Sumber Dana (574-282)	
JUMLAH				374.336.388,00		

Kepala Bidang Administrasi dan Penyelenggaraan Desa,
Kabupaten Cibeas
ADITYA ABIE MAULANA, S.STP.
NIP. 19830419 200110 1 001

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Kabupaten Cibeas
DANI HARWADI, S.P., M.Si.
NIP. 19771010 200501 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. UDIN SAMSUDIN, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa pada Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambon, Januari 2022

Pihak Kedua,

ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.
Penata Tk.I
NIP. 19830429 200112 1 003

Pihak Kesatu,

H. UDIN SAMSUDIN, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19730429 198003 1 008

LAMPIRAN PERJALAN KEMERJA TAHUN 2022
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON



No	Tujuan / Sasaran / Strategi	Indikator Kinerja (Output / Manfaat)	Pencapaian		Tipe	Sasaran	Sumber Data	Target Kinerja
			Sumbu	Target				
1.1.	Meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan desa	Meningkatnya jumlah desa mandiri	148	148	Non Kumulatif	Meningkat	(7)	88
1.1.1.	Meningkatnya Status Desa Mandiri Desa	148 Desa Mandiri			Non Kumulatif	Meningkat		48 Desa
1.1.2.	Meningkatnya Status Desa Mandiri Desa	148 Desa Mandiri			Non Kumulatif	Meningkat		47 Desa
1.1.3.	Meningkatnya Status Desa Mandiri Desa	148 Desa Mandiri			Non Kumulatif	Meningkat		47 Desa
1.1.3.01.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output / Capaian	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kemungkinan			
1.1.3.01.01.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	148	148	3.847.184.832,00	100			
1.1.3.01.02.	Penelitian dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Aplikasi Pemrosesan Desa Pemukiman Desa dan RT/RTAW terdapat Pemetaan atau pengamatan lapangan saat bulan Januari dan penyelenggara pemetaan desa yang di kabupaten kabupaten	1788 Orang	3.847.184.832,00	Sumber Data			
1.1.3.01.03.	Penyusunan Penyelenggaraan Kemitraan Sosial Pemerintahan Desa	Jumlah SPPT Kemitraan dan Penyelenggaraan Desa yang dilayani	311 Orang	17.415.000,00	Sumber Data: RT/RTAW, RT/RTAW, RT/RTAW			
1.1.3.01.04.	Penyusunan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa	Jumlah Desa yang telah selesai dan terdapat SPPT Desa	4832 Orang	3.813.870.012,00	Sumber Data: RT/RTAW, RT/RTAW, RT/RTAW			
1.1.3.01.05.	Penyusunan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa	Jumlah Desa yang telah selesai dan terdapat SPPT Desa	300 Orang	23.385.000,00	Sumber Data: RT/RTAW			
			J U M L A H	3.867.184.832,00				

Prak Kasi
Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa
ADITYA ABIF MAULANA, S.STP.
Pencat TLJ
NIP. 19830409 200112 1 001

Sumber: Januari 2022
Prak Kasi
Kepala Sesi Apresiasi Pemertintahan Desa Kota Cirebon
Administrasi dan Pemerintahan Desa
M. UDIN KAMBUKUSUMAH, M.Si.
NIP. 19600429 196003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSURI, SSTP.
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.
Jabatan : Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.
Penata Tk.I
NP. 19830429 200112 1 003

SAMSURI, SSTP.
Penata Tk.I
NP. 19840319 200212 1 003



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON

No	Tajuk / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Output / Dampak)	Pembinaan		Tipe	Target	Sumber Dana	Target Kinerja
			Buaya	Manfaat				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.1.	Meningkatkan status kemandirian dan kemandirian Desa	Meningkatkan jumlah desa mandiri	Bantuan Desa Bertindak Diri Mandiri	Non Kandidat	Harapan	Bantuan	49 Desa	
1.1.5.	Meningkatnya Status desa Desa Mandiri	100% Status Indeks Desa Mandiri	Semua Desa yang telah melaksanakan kegiatan Desa Mandiri	Non Kandidat	Harapan	Bantuan Administrasi Pemeliharaan Desa dan lain sebagainya	5.13 Desa	
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Kegiatan)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.-)	Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1.1.5.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			183.766.000,00				
1.1.5.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1798 Orang	183.766.000,00	Sumber Dana			
1.1.5.04.2.01.01.	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bantuan Desa yang dilanda uli Penyelenggaraan	115 Desa	14.993.183,00	Sumber Dana (DT1-041)			
1.1.5.04.2.01.02.	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bantuan Desa yang dilanda uli Penyelenggaraan	49 Desa	5,700	Sumber Dana (DT1-041)			
1.1.5.04.2.01.03.	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bantuan Desa yang dilanda uli Penyelenggaraan	100 Desa	16.015.983,00	Sumber Dana (DT1-041)			
1.1.5.04.2.01.04.	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bantuan Desa yang dilanda uli Penyelenggaraan	5 Desa	3,000	Sumber Dana (DT1-041)			
1.1.5.04.2.01.05.	Facilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bantuan Desa yang dilanda uli Penyelenggaraan	100 Desa	72.244.000,00	Sumber Dana (DT1-041)			
J U M L A H				183.766.000,00				

Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa,
Pihak Kedua
AGITYA ARIEF MAULANA, S.STP.
Pewes TUGJ
NIP. 19830429 2005111 1 003

Sumber: Januari 2022
Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengolahan Kepegawaian dan Asset Desa
Pada Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa.
SAMSUEL SEPTA,
Pewes TUGJ
NIP. 19840319 2001127 1 003

BAB IV. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dilingkungan instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.

Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.